

Pembentukan Moral di Era Pascakebenaran: Tantangan Epistemik bagi Pendidikan Kristiani

Satria Evans Umboh¹, Benyamin Pintakhari²

¹Sekolah Tinggi Teologi IKAT, Jakarta

²Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti, Yogyakarta

correspondence: satriaumboh@sttikat.ac.id

<https://doi.org/10.46929/graciadeo.v8i2.252>

Abstract: The post-truth era, in which appeals to emotion and personal belief outweigh objective facts, poses a challenge that is not merely informational but epistemic and moral. This article aims to analyze why the post-truth condition specifically threatens moral formation in Christian Education (CE) and to propose a theologically grounded response. Employing a critical-conceptual study of recent theological, philosophical, and educational literature, the research argues that moral formation presupposes a commitment to truth; therefore, subordinating truth to preference, emotion, and tribal identity corrodes the very ground on which CE forms persons. Four concrete epistemic challenges are mapped: the erosion of epistemic trust, confirmation bias and echo chambers, the temptation of anti-intellectual fideism, and the teacher-competence gap. As a way forward, the article proposes cultivating intellectual and moral virtues within a community of truthful practice, anchored in a theological epistemology of “proper confidence.” Its contribution is a virtue-based framework for post-truth-resilient moral formation in CE.

Keywords: Christian religious education; intellectual virtues; moral formation; post-truth; theological epistemology

Abstrak: Era pascakebenaran, ketika seruan kepada emosi dan keyakinan pribadi mengungguli fakta objektif, menghadirkan tantangan yang bukan sekadar informasional, melainkan epistemik dan moral. Artikel ini bertujuan menganalisis mengapa kondisi pascakebenaran secara khusus mengancam pembentukan moral dalam pendidikan Kristiani (PK) serta mengusulkan respons yang berpijak pada landasan teologis. Menggunakan metode kajian konseptual-kritis atas literatur teologi, filsafat, dan pendidikan mutakhir, penelitian ini berargumen bahwa pembentukan moral mengandaikan komitmen pada kebenaran; karena itu, penundukan kebenaran kepada preferensi, emosi, dan identitas kesukuan menggerus dasar tempat PK membentuk pribadi. Empat tantangan epistemik konkret dipetakan: erosi kepercayaan epistemik, bias konfirmasi dan ruang gema, godaan fideisme anti-intelektual, serta kesenjangan kompetensi guru. Sebagai jalan keluar, artikel mengusulkan pembentukan keutamaan intelektual-moral dalam komunitas praktik yang jujur, berlabuh pada epistemologi teologis “keyakinan yang sepatutnya.” Kontribusinya adalah kerangka berbasis keutamaan untuk pembentukan moral PK yang tahan terhadap pascakebenaran.

Kata kunci: epistemologi teologis, keutamaan intelektual, pascakebenaran, pembentukan moral, Pendidikan Kristiani

PENDAHULUAN

Pada tahun 2016, Oxford Dictionaries menahbiskan "post-truth" sebagai kata tahun itu, sebuah penanda zaman ketika seruan kepada emosi dan keyakinan pribadi lebih berpengaruh dalam membentuk opini publik daripada fakta objektif. McIntyre menegaskan bahwa pascakebenaran bukanlah ketiadaan kebenaran, melainkan penundukan kebenaran di bawah kepentingan, perasaan, dan loyalitas politik.¹ Fenomena ini menyebar melalui media sosial dalam bentuk berita bohong, ujaran kebencian, dan disinformasi dan dengan cepat menjadi persoalan global yang juga menerpa kehidupan beragama.

Indonesia tidak kebal terhadap gelombang ini. Sejumlah kajian teologis Indonesia mendokumentasikan bagaimana hoaks dan ujaran kebencian merembes ke dalam ruang keagamaan, bahkan dipakai untuk membungkus kepentingan dengan jubah kesalehan. Simon, dengan membaca fenomena ini melalui hermeneutika Paul Ricoeur, menunjukkan bahwa pascakebenaran menandai kesadaran yang terpicat pada diri sendiri seperti tertutup dan menolak intersubjektivitas, sehingga melahirkan cara berpikir egologis.² Gereja pun ditantang untuk hadir sebagai agen kebenaran di tengah arus disinformasi yang deras.³

Di sinilah Pendidikan Kristiani (PK) berhadapan dengan persoalan yang lebih dalam daripada sekadar literasi media. Pascakebenaran bukan semata-mata krisis informasi yang dapat diatasi dengan verifikasi fakta; ia adalah krisis epistemik sekaligus moral. Lee memperlihatkan bahwa akar pascakebenaran terletak pada rasa diri yang parokial dan defensif; sebuah pola pikir yang menarik garis batas antara "kita" dan "mereka," sehingga pendidikan agama dituntut merespons bukan sekadar pada tataran membaca kritis, melainkan pada tataran pembentukan diri.⁴ Tantangan ini menyentuh inti PK, sebab pembentukan moral senantiasa mengandaikan hubungan dengan kebenaran.

Di sinilah celah penelitian terbuka. Literatur Indonesia tentang PK dan pascakebenaran sejauh ini cenderung bergerak pada dua kutub: sebagian menyoroti peran guru dalam mengatasi dekadensi moral di era disrupsi secara umum,⁵ sedangkan sebagian lagi menawarkan respons hermeneutis atau literasi digital. Namun, belum banyak yang menelisik secara khusus bagaimana struktur epistemik pascakebenaran, di mana penundukan kebenaran kepada emosi dan identitas menggerogoti landasan tempat pembentukan moral PK berpijak, lalu merumuskan respons yang berakar pada epistemologi teologis. Akibatnya, diskursus kerap berhenti pada "bagaimana melawan hoaks" dan jarang menanyakan "mengapa pembentukan moral menjadi mustahil tanpa komitmen pada kebenaran."

Penelitian ini memiliki tiga tujuan. Pertama, menganalisis anatomi pascakebenaran sebagai krisis epistemik-moral, bukan sekadar krisis informasi. Kedua, menjelaskan me-

¹ Lee McIntyre, *Post-Truth* (Cambridge, MA: MIT Press, 2018), 1–5.

² John Christianto Simon, "Pendidikan Kristiani di Era Post-Truth: Sebuah Perenungan Hermeneutis Paul Ricoeur," *Dunamis: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 5, no. 1 (2020): 93–110, <https://doi.org/10.30648/dun.v5i1.330>.

³ A. Y. Leki Tamukun dkk., "Teologi di Era Post-Truth dan Tantangan Gereja dalam Menyampaikan Kebenaran di Tengah Hoaks dan Disinformasi," *Jurnal Masalah Pastoral* 13, no. 1 (2025): 32–47, <https://doi.org/10.60011/jumpa.v13i1.178>.

⁴ Song-Chong Lee, "Boundary-Breaking Disposition against Post-Truth: Five Big Questions for Religious Education," *Religions* 9, no. 10 (2018): 316, <https://doi.org/10.3390/rel9100316>.

⁵ Yonatan Alex Arifianto, "Peran Guru Pendidikan Kristiani dalam Pendidikan Etis-Teologis Mengatasi Dekadensi Moral di Tengah Era Disrupsi," *Regula Fidei: Jurnal Pendidikan Kristiani* 6, no. 1 (2021): 45–59.

ngapa kondisi ini secara khusus mengancam pembentukan moral dalam PK serta memetakan tantangan epistemiknya secara konkret. Ketiga, merumuskan kerangka respons berbasis pembentukan keutamaan intelektual-moral yang berlabuh pada epistemologi teologis, sehingga PK tidak hanya bertahan, tetapi juga membentuk pribadi yang tahan terhadap pascakebenaran.

METODE PENELITIAN

Secara metodologis, artikel ini merupakan kajian konseptual-kritis dengan pendekatan analisis epistemik-teologis terhadap literatur. Sumber utama diambil dari artikel jurnal yang relevan, lalu dibaca melalui tiga lensa yang saling melengkapi: epistemologi keutamaan, etika keutamaan komunitarian, dan epistemologi teologis. Pembacaan dilakukan untuk menafsir, membandingkan, dan menilai klaim, bukan untuk menguji data lapangan; kontribusinya bersifat konstruktif-teoretis bagi pengembangan PK.

Arah pembahasan terbagi menjadi empat bagian. Bagian pertama menguraikan anatomi pascakebenaran sebagai krisis epistemik. Bagian kedua menjelaskan mengapa krisis itu secara khusus menantang pembentukan moral PK. Bagian ketiga memetakan empat tantangan epistemik yang konkret. Bagian keempat mengusulkan pembentukan keutamaan intelektual-moral sebagai jalan keluar. Keseluruhan argumen bermuara pada satu tesis: jawaban PK atas pascakebenaran bukanlah sekadar pengecekan fakta, melainkan pembentukan pribadi yang mencintai kebenaran di dalam komunitas yang jujur dan berakar pada Sang Kebenaran.

PEMBAHASAN

Anatomi Pascakebenaran: Krisis Epistemik, Bukan Sekadar Krisis Informasi

Respons yang tepat terhadap pascakebenaran menuntut diagnosis yang akurat. Kekeliruan umum ialah menyamakannya dengan maraknya berita bohong, seolah persoalannya hanya kuantitas informasi palsu yang dapat ditangkal melalui verifikasi. Padahal, sebagaimana ditegaskan McIntyre, inti pascakebenaran bukanlah kebohongan, melainkan pergeseran relasi manusia dengan kebenaran itu sendiri: fakta tidak dibantah, melainkan dianggap kalah penting dibandingkan dengan apa yang dirasakan dan diyakini.⁶ Ini adalah pergeseran epistemik yang mendasar, bukan sekadar membludaknya hoaks.

Pergeseran ini paling tajam terlihat dalam kategori yang dirumuskan Frankfurt sebagai “omong kosong” (*bullshit*). Berbeda dari pembohong yang masih menghormati kebenaran dengan cara menyembunyikannya, pelaku omong kosong sama sekali tidak peduli apakah ucapannya benar atau salah, melainkan hanya peduli pada efek yang ingin dicapai.⁷ Sikap acuh tak acuh terhadap kebenaran, bukan kebohongan yang disengaja, melainkan menjadi ciri khas budaya pascakebenaran. Ketika ketidakpedulian ini menjadi kebiasaan kolektif, kebenaran berhenti menjadi tolok ukur bersama dan berubah menjadi soal selera.

Akar persoalan ini bersifat antropologis. Simon, melalui Ricoeur, menunjukkan bahwa pascakebenaran berakar pada subjek yang pongah dan tertutup, yang dihidupi oleh ke-

⁶ McIntyre, *post-Truth*, 5–7.

⁷ Harry G. Frankfurt, *On Bullshit* (Princeton: Princeton University Press, 2005), 33–34.

tidakpercayaan dan skeptisisme sehingga menolak intersubjektivitas.⁸ Diri yang egologis semacam ini menjadikan dirinya sebagai ukuran kebenaran dan menutup diri dari koreksi orang lain. Dengan demikian, pascakebenaran bukan terutama persoalan teknologi atau media, melainkan persoalan kondisi batin manusia yang kemudian diperkuat dan diperluas oleh teknologi.

Lee mempertajam diagnosis ini dengan menunjuk pada rasa diri yang parokial dan defensif sebagai sumber pascakebenaran. Hal ini merupakan pola pikir yang menarik garis batas dan mempertahankannya secara agresif. Dalam logika ini, kebenaran suatu klaim ditentukan bukan oleh kesesuaiannya dengan kenyataan, melainkan oleh kesesuaiannya dengan identitas kelompok.⁹ Inilah yang sering disebut epistemologi kesukuan (*tribal epistemology*): “benar” berarti “sesuai dengan apa yang diyakini oleh kelompokku.” Di sini fakta dan nilai, kebenaran dan loyalitas menjadi kabur dan saling tertukar.

Dalam konteks keagamaan di Indonesia, dinamika ini berbahaya secara khusus. Kajian menunjukkan bahwa hoaks dan disinformasi kerap berkelindan dengan populisme agama dan emosi sosial, sehingga isu keagamaan menjadi bahan bakar polarisasi.¹⁰ Ketika sentimen keagamaan dimobilisasi dengan mengabaikan kebenaran faktual, agama yang semestinya menjadi penjaga kebenaran justru dapat berubah menjadi kendaraan disinformasi. Gereja dan lembaga pendidikan Kristen tidak berdiri di luar pusaran ini; mereka berada tepat di tengahnya.

Pembedaan antara pascakebenaran dan skeptisisme yang sehat perlu ditegaskan dengan saksama. Sikap mempertanyakan klaim, menuntut bukti, dan mengakui keterbatasan pengetahuan merupakan kebajikan intelektual yang sah. Pascakebenaran bukanlah sikap kritis semacam itu, melainkan kebalikannya: ia adalah kepercayaan selektif yang tidak kritis terhadap apa yang menyenangkan dan penolakan dogmatis terhadap apa yang mengganggu. Hal yang runtuh dalam pascakebenaran bukan kepastian naif, melainkan komitmen bersama untuk mencari kebenaran di atas kepentingan diri.

Implikasi epistemik ini berdampak langsung pada moralitas. Bila kebenaran direduksi menjadi preferensi, maka penilaian moral pun kehilangan jangkar objektifnya dan ikut tergelincir menjadi soal selera. Tindakan tidak lagi dinilai benar atau salah berdasarkan kenyataan dan prinsip, melainkan berdasarkan apakah tindakan tersebut menguntungkan atau menyenangkan kelompoknya sendiri. Relativisme epistemik, dengan kata lain, melahirkan relativisme moral; keduanya adalah dua sisi dari mata uang yang sama.

Diagnosis ini menjelaskan mengapa respons yang hanya bersifat teknis, di mana pelatihan verifikasi fakta atau literasi media semata tidak akan memadai. Persoalannya bukan kekurangan informasi yang benar, melainkan hilangnya kerinduan dan komitmen untuk mengutamakan kebenaran. Respons yang memadai harus menyentuh pembentukan diri: membentuk pribadi yang mencintai kebenaran, terbuka terhadap koreksi, dan setia pada kenyataan meski tidak menyenangkan.

⁸ Simon, “Pendidikan Kristiani di Era Post-Truth.”

⁹ Lee, “Boundary-Breaking Disposition against Post-Truth.”

¹⁰ Leki Tamukun dkk., “Teologi di Era Post-Truth.”

Pascakebenaran sebagai Ancaman Fundamental bagi Pembentukan Moral dalam Pendidikan Kristiani

Pembentukan moral, pada hakikatnya, mengandaikan suatu hubungan dengan kebenaran. Groome menempatkan PK sebagai proses dialogis yang menautkan kisah dan visi iman dengan pengalaman hidup menuju tindakan yang transformatif, sebuah proses yang hanya bermakna jika kisah dan visi itu diyakini sebagai benar.¹¹ Bila kebenaran kisah iman direduksi menjadi sekadar preferensi kultural, maka tindakan transformatif yang diharapkan kehilangan dasarnya. Pembentukan moral tanpa komitmen pada kebenaran berubah menjadi sekadar pengondisian selera.

Taruhan ini berlipat ganda dalam PK, karena objek formasinya bukan sekadar seperangkat nilai, melainkan relasi dengan Pribadi yang menyebut diri-Nya “jalan, kebenaran, dan hidup.” Dalam iman Kristen, kebenaran bukanlah konsep abstrak, melainkan pribadi yang berpuncak pada Kristus. Dengan demikian, ketika budaya pascakebenaran mengajarkan bahwa kebenaran itu cair dan tunduk pada perasaan, ia tidak hanya menggoyahkan satu nilai, tetapi juga merongrong fondasi seluruh bangunan iman dan moral yang hendak dibentuk PK.

Ancaman pertama adalah reduksi kebenaran menjadi preferensi, yang melahirkan relativisme moral. Ketika peserta didik menyerap asumsi bahwa “apa yang benar bagimu belum tentu benar bagiku” sebagai prinsip universal, maka klaim moral apa pun, termasuk panggilan untuk mengasihi sesama dan menegakkan keadilan, kehilangan daya mengikatnya. Pembentukan moral menjadi mustahil bila tidak ada kebenaran yang lebih tinggi daripada keinginan individu.

Ancaman kedua adalah dominasi emosi atas fakta, yang membuka pintu bagi manipulasi. Leki Tamukun dan kawan-kawan menunjukkan bagaimana ujaran kebencian dan disinformasi dapat menyusup ke dalam komunitas iman, memanfaatkan emosi keagamaan untuk tujuan yang bertentangan dengan kasih.¹² Peserta didik yang dibentuk dalam budaya pascakebenaran rentan digerakkan oleh kemarahan dan ketakutan ketimbang pertimbangan yang jernih, sehingga energi keagamaan mereka mudah dibajak untuk polarisasi alih-alih rekonsiliasi.

Ancaman ketiga adalah epistemologi kesukuan yang menempatkan identitas di atas kebenaran. Lee memperingatkan bahwa rasa diri yang defensif menjadikan loyalitas kelompok sebagai kriteria kebenaran.¹³ Dalam konteks PK Indonesia yang plural, kecenderungan ini sangat berbahaya: iman dapat merosot menjadi penanda identitas kesukuan yang dipertahankan secara agresif, alih-alih menjadi komitmen pada kebenaran yang membebaskan dan merangkul. Pembentukan moral yang sehat menuntut kemampuan membedakan kesetiaan pada kebenaran dari kesetiaan buta pada kelompok.

Di hadapan ancaman ini, peran guru PK menjadi sangat menentukan sekaligus berat. Arifianto menegaskan bahwa guru PK dipanggil untuk menjalankan pendidikan etis-teologis guna mengatasi dekadensi moral di tengah era disrupsi; sebuah panggilan yang menuntut lebih dari sekadar penyampaian materi.¹⁴ Guru harus menjadi pribadi yang menun-

¹¹ Thomas H. Groome, *Christian Religious Education: Sharing Our Story and Vision* (San Francisco: Harper & Row, 1980), 184–188.

¹² Tamukun dkk., “Teologi di Era Post-Truth.”

¹³ Lee, “Boundary-Breaking Disposition against Post-Truth.”

¹⁴ Arifianto, “Peran Guru Pendidikan Kristiani.”

jukkan komitmen pada kebenaran dalam kata dan tindakan, sebab pembentukan moral terjadi melalui keteladanan yang hidup, bukan sekadar instruksi verbal.

Hauerwas menolong kita memahami mengapa demikian. Menurutnya, pembentukan karakter berlangsung di dalam komunitas yang dibentuk oleh narasi yang benar; kejujuran (*truthfulness*) bukanlah keutamaan individual yang terisolasi, melainkan praktik komunal yang menopang seluruh kehidupan moral suatu komunitas.¹⁵ Dengan kerangka ini, jelas bahwa pascakebenaran menyerang tepat pada jantung pembentukan moral: ia merusak praktik kejujuran komunal yang menjadi prasyarat bagi terbentuknya karakter. Oleh sebab itu, PK tidak dapat membentuk pribadi bermoral tanpa lebih dahulu menjadi komunitas yang jujur.

Dari sini tampak bahwa tantangan pascakebenaran bagi PK bersifat fundamental, bukan perifer. Ia tidak sekadar menambah satu materi baru (“melawan hoaks”) ke dalam kurikulum, melainkan menggugat prasyarat yang memungkinkan terbentuknya moral itu sendiri. Karena itu, sebelum merumuskan respons, perlu dipetakan secara konkret tantangan epistemik yang dihadapi PK di lapangan agar respons yang diberikan tepat sasaran. Pemetaan inilah yang menjadi fokus pada bagian berikutnya.

Pemetaan Tantangan Epistemik Pascakebenaran dalam Konteks Pendidikan Kristiani

Tantangan pertama adalah erosi kepercayaan epistemik. Di era ketika setiap klaim dapat dibantah dengan “riset” tandingan dan setiap otoritas dicurigai, peserta didik kebingungan menentukan siapa dan apa yang layak dipercaya. Karlau dan Rukua mendokumentasikan bahwa guru PK menghadapi tantangan nyata dalam menyikapi pascakebenaran di era disrupsi teknologi informasi, termasuk dalam mempertahankan kredibilitasnya sebagai rujukan.¹⁶ Ketika kepercayaan runtuh secara menyeluruh, yang tersisa bukanlah pencarian kebenaran yang lebih cermat, melainkan sinisme yang melumpuhkan peserta didik hingga mereka berhenti percaya pada apa pun selain apa yang mereka inginkan.

Tantangan kedua adalah bias konfirmasi yang diperkuat oleh ruang gema digital. Algoritma media sosial cenderung menyuguhkan konten yang menegaskan keyakinan yang sudah ada, sehingga peserta didik terkurung dalam gelembung informasi yang memperkuat prasangka mereka. Boiliu menyoro dilema etis dan spiritual yang muncul dari ketergantungan pada teknologi modern dalam pendidikan Kristiani, termasuk penyempitan cakrawala berpikir.¹⁷ Dalam lingkungan seperti ini, peserta didik jarang berjumpa dengan pandangan yang menantang, padahal perjumpaan semacam itulah yang menumbuhkan kerendahan hati intelektual dan kedewasaan iman.

Tantangan ketiga bersifat khas teologis: godaan fideisme anti-intelektual sebagai reaksi terhadap pascakebenaran. Ketika kebenaran tampak mustahil dicapai, sebagian orang Kristen tergoda untuk menarik diri ke dalam keyakinan yang kebal terhadap pertanyaan, lalu memperlakukan iman sebagai benteng yang menolak segala pemeriksaan rasional.

¹⁵ Stanley Hauerwas, *A Community of Character: Toward a Constructive Christian Social Ethic* (Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1981), 9–12.

¹⁶ Sensus Amon Karlau dan Ivo Sastri Rukua, “Kompetensi Guru Pendidikan Kristiani Menyikapi Post-Truth pada Era Disrupsi Teknologi Informasi,” *Didache: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen* 2, no. 1 (2023): 50–62, <https://doi.org/10.55076/didache.v2i1.41>.

¹⁷ Noh Ibrahim Boiliu, “Etika dan Dilema Spiritualitas di Era Artificial Inteligent: Karya Roh Kudus bagi Pendidikan Kristiani dalam Menghadapi Tantangan Teknologi Modern,” *Kurios: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 10, no. 3 (2024): 662–671, <https://doi.org/10.30995/kur.v10i3.1158>.

Newbiggin mendiagnosis bahwa baik fundamentalisme maupun liberalisme sama-sama lahir dari kegagalan menghadapi runtuhnya kepastian Cartesian; pencarian kepastian mutlak ala Descartes justru berujung pada nihilisme ketika ternyata tak ada yang lolos dari keraguan.¹⁸ Bagi PK, godaan menjadikan iman sebagai pelarian dari tanggung jawab epistemik sama berbahayanya dengan relativisme yang hendak dilawan.

Tantangan keempat adalah kesenjangan kompetensi guru. Respons pascakebenaran menuntut guru PK yang tidak hanya menguasai materi iman, tetapi juga memahami dinamika epistemik dan digital yang membentuk peserta didiknya. Karlau dan Rukua menunjukkan bahwa kompetensi guru PK dalam menyikapi pascakebenaran masih perlu diperkuat secara serius.¹⁹ Tanpa pembekalan yang memadai, guru berisiko gagap; entah menyerah pada relativisme demi tampak relevan, entah bersikap otoriter dan defensif yang justru mengasingkan peserta didik.

Keempat tantangan ini saling memperkuat. Erosi kepercayaan mendorong orang mencari kepastian semu di dalam ruang gema; ruang gema memperkuat bias yang membuat fideisme terasa nyaman; dan kesenjangan kompetensi guru membuat ketiganya tidak tertangani. Hasilnya adalah lingkaran setan epistemik yang sulit diputus jika hanya ditangani secara sepotong-sepotong. Diperlukan respons yang menysar akar bersama keempatnya, yakni cara peserta didik berelasi dengan kebenaran.

Penting untuk dicatat bahwa tantangan-tantangan ini tidak menjadikan PK menjadi tak berdaya. Justru sebaliknya, tradisi Kristen memiliki sumber daya epistemik yang kaya untuk menjawabnya. Simon mengingatkan bahwa perspektif pendidikan menurut Ricoeur adalah "kembali kesadaran," yakni kesatuan antara kata dan tindakan sebagai lawan tanding langsung bagi pascakebenaran yang memisahkan keduanya.²⁰ Pendidikan iman yang sejati, dengan demikian, secara hakiki bertentangan dengan logika pascakebenaran.

Lee bahkan menunjukkan bahwa pendidikan Kristiani memiliki sumbangan unik: pengalaman transendensi yang ditawarkan tradisi religius dapat menjadi landasan intelektual, psikologis, dan spiritual untuk menumbuhkan disposisi yang menembus batas (*boundary-breaking*), yakni sebagai lawan dari rasa diri yang parokial yang melahirkan pascakebenaran.²¹ Dengan kata lain, PK bukan sekadar korban pascakebenaran, melainkan dapat menjadi sumber penangkalnya, asalkan ia menyadari dan mengaktifkan kekayaan epistemik-spiritualnya sendiri.

Pemetaan ini menegaskan bahwa respons PK harus bersifat formatif dan teologis sekaligus, bukan semata-mata bersifat teknis. Ia harus membentuk cara peserta didik berelasi dengan kebenaran yang menumbuhkan kepercayaan yang kritis, keterbukaan terhadap koreksi, ketahanan terhadap fideisme, dan kompetensi guru, dengan berpijak pada pemahaman teologis tentang kebenaran. Kerangka respons inilah yang ditawarkan pada bagian penutup pembahasan.

¹⁸ Lesslie Newbiggin, *Proper Confidence: Faith, Doubt, and Certainty in Christian Discipleship* (Grand Rapids: Eerdmans, 1995), 21–24.

¹⁹ Karlau dan Rukua, "Kompetensi Guru Pendidikan Kristiani."

²⁰ Simon, "Pendidikan Kristiani di Era Post-Truth."

²¹ Lee, "Boundary-Breaking Disposition against Post-Truth."

Menuju Pembentukan Moral Pendidikan Kristiani yang Tahan Pascakebenaran: Pendidikan Keutamaan Intelektual-Moral

Prinsip pertama adalah menumbuhkan keutamaan intelektual, bukan sekadar keterampilan teknis. Verifikasi fakta dan literasi media memang perlu, tetapi tidak cukup, sebab persoalan pascakebenaran terletak pada disposisi batin, bukan pada kekurangan informasi. Zagzebski merumuskan keutamaan intelektual sebagai sifat watak yang baik secara mendalam, yang menyatukan motivasi yang benar, terutama cinta akan kebenaran, dengan keandalan dalam mencapainya.²² Tujuan PAK, karena itu, bukan sekadar membekali peserta didik dengan kemampuan mendeteksi hoaks, melainkan menumbuhkan dalam diri mereka kecintaan pada kebenaran yang membuat mereka enggan ditipu dan enggan menipu.

Prinsip kedua adalah memadukan keutamaan intelektual dengan keutamaan moral di dalam praktik. MacIntyre menunjukkan bahwa keutamaan tumbuh melalui partisipasi dalam praktik-praktik komunitas yang memiliki kebaikan internal, melalui pembiasaan yang ditempa dalam relasi dan waktu.²³ Kerendahan hati intelektual, keberanian untuk mengakui kekeliruan, dan keadilan dalam menimbang pandangan lawan bukanlah informasi yang dapat ditransfer, melainkan kebiasaan yang harus dilatih. PK perlu merancang praktik-praktik konkret, diskusi yang jujur, perjumpaan dengan pandangan berbeda, dan pengakuan kesalahan bersama yang menumbuhkan keutamaan ini.

Prinsip ketiga adalah membentuk komunitas praktik yang jujur. Hauerwas menegaskan bahwa karakter terbentuk dalam komunitas yang dibentuk oleh narasi yang benar, dan kejujuran adalah praktik komunal yang menopang kehidupan moral bersama.²⁴ PK tidak dapat membentuk pribadi yang mencintai kebenaran di dalam komunitas yang menoleransi kebohongan demi kepentingan kelompok. Dengan demikian, kelas, gereja, dan keluarga Kristen harus menjadi ruang tempat kebenaran dihargai melampaui kenyamanan, yakni tempat di mana mengakui kesalahan dipandang sebagai kekuatan, bukan kekalahan.

Prinsip keempat, dan paling mendasar, adalah berlabuh pada epistemologi teologis yang Newbiggin sebut “keyakinan yang sepatutnya” (*proper confidence*). Newbiggin menawarkan jalan tengah antara kepastian mutlak ala Descartes dan keputusasaan relativis: pengetahuan sejati selalu bersifat personal dan berakar pada komitmen, sehingga iman Kristen dapat dengan rendah hati namun percaya diri menegaskan Injil sebagai kebenaran publik.²⁵ Sikap ini membebaskan PK dari dua jebakan kembar, yakni arogansi yang mengklaim kepastian tak terbantahkan dan relativisme yang menyerah pada ketiadaan kebenaran, serta menggantinya dengan kesaksian yang teguh sekaligus terbuka.

Prinsip kelima adalah pembentukan melalui liturgi dan praktik, bukan sekadar argumen. Smith mengingatkan bahwa manusia dibentuk pada tataran prarefleksif oleh praktik-praktik yang membentuk kerinduannya; identitas dan komitmen kita ditempa oleh apa yang kita cintai, bukan semata oleh apa yang kita pikirkan.²⁶ Karena pascakebenaran juga membentuk kerinduan melalui kebiasaan digital, PK harus menyediakan “liturgi tanding-

²² Linda Trinkaus Zagzebski, *Virtues of the Mind: An Inquiry into the Nature of Virtue and the Ethical Foundations of Knowledge* (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), 137–141.

²³ Alasdair MacIntyre, *After Virtue: A Study in Moral Theory*, ed. ke-3 (Notre Dame: University of Notre Dame Press, 2007), 187–191.

²⁴ Hauerwas, *A Community of Character*, 15–18.

²⁵ Newbiggin, *Proper Confidence*, 102–105.

²⁶ James K. A. Smith, *Desiring the Kingdom: Worship, Worldview, and Cultural Formation* (Grand Rapids: Baker Academic, 2009), 37–41.

an” seperti ibadah, doa, pembacaan Kitab Suci bersama, and pelayanan yang menanamkan kecintaan pada kebenaran dan kasih secara mendalam, melampaui jangkauan argumen rasional semata.

Prinsip keenam adalah menjadikan literasi digital sebagai disiplin rohani, bukan sekadar kecakapan teknis. Boiliu menempatkan karya Roh Kudus sebagai pusat diskursus krisis Kristiani di tengah tantangan teknologi modern, sehingga kemampuan menapis informasi menjadi bagian dari kepekaan rohani yang dibimbing Roh.²⁷ Dalam kerangka ini, mengevaluasi sumber, menahan diri dari menyebarkan yang belum terverifikasi, dan bersedia mendengar yang berbeda bukan sekadar etiket bermedia, melainkan latihan keutamaan dan ketaatan iman.

Prinsip ketujuh adalah peran guru sebagai saksi kebenaran yang berinkarnasi. Arifianto menekankan bahwa guru PK menjalankan pendidikan etis-teologis melalui keteladanan, bukan sekadar pengajaran.²⁸ Di era pascakebenaran, kesaksian guru yang konsisten antara kata dan tindakan, persis “kembali kesadaran” yang dimaksud Simon, menjadi argumen yang paling meyakinkan. Peserta didik belajar mencintai kebenaran terutama dengan menyaksikan pribadi yang hidup dalam kebenaran, bukan dengan mendengarkan ceramah tentangnya.

Ketujuh prinsip ini membentuk satu kerangka yang utuh: pembentukan keutamaan intelektual-moral dalam komunitas praktik yang jujur, berlabuh pada keyakinan teologis yang sepatutnya, dan diteladankan oleh guru sebagai saksi. Lee menyebut transendensi sebagai landasan untuk menumbuhkan disposisi yang menembus batas; di sinilah sumbangan unik PK, di mana tidak hanya melatih nalar kritis, tetapi juga mengarahkan seluruh pribadi kepada Sang Kebenaran yang melampaui dan sekaligus merangkul.²⁹ Dengan kerangka ini, PK tidak sekadar bertahan menghadapi pascakebenaran, melainkan membentuk pribadi yang menjadi penangkalnya.

KESIMPULAN

Pascakebenaran bukanlah sekadar banjir hoaks yang dapat ditangkal dengan verifikasi fakta, melainkan krisis epistemik-moral yang menundukkan kebenaran pada emosi, preferensi, dan identitas kesukuan. Bagi pendidikan Kristiani, krisis ini bersifat fundamental karena pembentukan moral mengandaikan komitmen pada kebenaran, sementara objek formasi PK adalah relasi dengan Kebenaran yang bersifat personal di dalam Kristus. Empat tantangan epistemik: erosi kepercayaan, bias konfirmasi dalam ruang gema, godaan fideisme anti-intelektual, dan kesenjangan kompetensi guru, saling memperkuat dan menggerogoti landasan pembentukan moral. Karena itu, respons yang memadai tidak cukup bersifat teknis, melainkan harus bersifat formatif dan teologis: menumbuhkan keutamaan intelektual-moral seperti cinta kebenaran, kerendahan hati, dan keberanian; membangun komunitas praktik yang jujur; berlabuh pada “keyakinan yang sepatutnya” yang menegaskan Injil sebagai kebenaran publik tanpa arogansi maupun keputusan; serta menghadirkan guru sebagai saksi kebenaran yang berinkarnasi. Dengan demikian, PK tidak hanya bertahan di era pascakebenaran, tetapi juga membentuk pribadi-pribadi yang mencintai dan menghidupi kebenaran.

²⁷ Boiliu, “Etika dan Dilema Spiritualitas.”

²⁸ Arifianto, “Peran Guru Pendidikan Kristiani.”

²⁹ Lee, “Boundary-Breaking Disposition against Post-Truth.”

REFERENSI

- Arifianto, Yonatan Alex, "Peran Guru Pendidikan Kristiani dalam Pendidikan Etis-Teologis Mengatasi Dekadensi Moral di Tengah Era Disrupsi." *Regula Fidei: Jurnal Pendidikan Kristiani* 6, no. 1 (2021): 45–59.
- Boiliu, Noh Ibrahim, "Etika dan Dilema Spiritualitas di Era Artificial Inteligent: Karya Roh Kudus bagi Pendidikan Kristiani dalam Menghadapi Tantangan Teknologi Modern." *Kurios: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 10, no. 3 (2024): 662–671. <https://doi.org/10.30995/kur.v10i3.1158>.
- Frankfurt, Harry G., *On Bullshit*. Princeton: Princeton University Press, 2005.
- Groome, Thomas H., *Christian Religious Education: Sharing Our Story and Vision*. San Francisco: Harper & Row, 1980.
- Hauerwas, Stanley, *A Community of Character: Toward a Constructive Christian Social Ethic*. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1981.
- Karlau, Sensius Amon, dan Ivo Sastri Rukua, "Kompetensi Guru Pendidikan Kristiani Menyikapi Post-Truth pada Era Disrupsi Teknologi Informasi." *Didache: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen* 2, no. 1 (2023): 50–62. <https://doi.org/10.55076/didache.v2i1.41>.
- Lee, Song-Chong, "Boundary-Breaking Disposition against Post-Truth: Five Big Questions for Religious Education." *Religions* 9, no. 10 (2018): 316. <https://doi.org/10.3390/rel9100316>.
- MacIntyre, Alasdair, *After Virtue: A Study in Moral Theory*. Ed. ke-3. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 2007.
- McIntyre, Lee, *Post-Truth*. Cambridge, MA: MIT Press, 2018.
- Newbiggin, Lesslie, *Proper Confidence: Faith, Doubt, and Certainty in Christian Discipleship*. Grand Rapids: Eerdmans, 1995.
- Simon, John Christianto, "Pendidikan Kristiani di Era Post-Truth: Sebuah Perenungan Hermeneutis Paul Ricoeur." *Dunamis: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 5, no. 1 (2020): 93–110. <https://doi.org/10.30648/dun.v5i1.330>.
- Smith, James K. A., *Desiring the Kingdom: Worship, Worldview, and Cultural Formation*. Grand Rapids: Baker Academic, 2009.
- Tamukun, A. Y. Leki, dkk., "Teologi di Era Post-Truth dan Tantangan Gereja dalam Menyampaikan Kebenaran di Tengah Hoaks dan Disinformasi." *Jurnal Masalah Pastoral* 13, no. 1 (2025): 32–47. <https://doi.org/10.60011/jumpa.v13i1.178>.
- Zagzebski, Linda Trinkaus, *Virtues of the Mind: An Inquiry into the Nature of Virtue and the Ethical Foundations of Knowledge*. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.